

TUGAS AKHIR
ANALISIS KINERJA REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019-2023



Disusun Oleh: 
Viony Monica Ratu
2022125783

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2024

TUGAS AKHIR
ANALISIS KINERJA REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019-2023



Disusun Oleh:
Viony Monica Ratu
2022125783

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2019-2023

Disusun oleh:
Viony Monica Ratu
2022125783

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi



Drs. Dwi Haryono Wiratno,
M.M., Ak., CA

Yogyakarta, 10 Desember 2024
Dosen Pembimbing



Stephanus Andi Adityaputra,
S.E., M.Acc.

Mengetahui,
Politeknik YKPN
Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc, Ak., CA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2023" disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program studi Diploma Tiga Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta.

Penulisan laporan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan hikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir.
2. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, dorongan semangat, serta bantuan doa sehingga dapat melaksanakan penyusunan laporan Tugas Akhir berjalan dengan lancar.
3. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan dan menyusun laporan Tugas Akhir.
4. Bapak Dr. Nung Harjanto, S.E., MAAC., Ak., CA selaku Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik YKPN Yogyakarta, yang telah memberikan pengarahan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Tugas Akhir.
5. Bapak Stephanus Andi Adityaputra, S.E., M.Acc. selaku Dosen Politeknik YKPN Yogyakarta, yang berkenan menjadi dosen pembimbing dan telah memberikan bimbingan serta arahan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Tugas Akhir.
6. Seluruh dosen Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis dalam menyusun laporan Tugas Akhir.
7. Teman-teman terdekat yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga

penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi materi, bahasa, maupun penulisannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, waktu, dan pengalaman, sehingga laporan ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan. Semoga laporan ini dapat memenuhi maksud, tujuan, dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 10 Desember 2024

Viony Monica Ratu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir	5
1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir	6
1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA	
2.1 Pemerintah Daerah	8
2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9
2.2.3 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	10
2.2.4 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.2.5 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	12
2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
2.3.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
2.3.3 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
2.3.4 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	16
2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	16
2.4.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	16
2.4.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	17
2.4.4 Elemen Laporan Realisasi Anggaran	17
2.5 Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ..	21
2.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	21
2.5.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	21
2.5.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	22
2.5.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	22
2.5.5 Rasio Pertumbuhan pendapatan	23
2.5.6 Rasio Varians Anggaran Pendapatan	23
2.5.7 Rasio Derajat Desentralisasi	24
BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian	26

BAB IV PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

4.1	Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kota Bogor	28
4.1.1	Sejarah Pemerintah Kota Bogor.....	28
4.1.2	Lambang Pemerintah Kota Bogor.....	29
4.1.3	Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor	30
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Bogor	30
4.2	Analisis Data dan Pembahasan	31
4.2.1	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah	31
4.2.2	Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah	32
4.2.3	Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	33
4.2.4	Analisis Efisiensi Keuangan Daerah	34
4.2.5	Analisis Pertumbuhan Pendapatan	35
4.2.6	Analisis Varians Anggaran Pendapatan	36
4.2.7	Analisis Derajat Desentralisasi	37

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	39
5.2	Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Interval Rasio Kemandirian.....	21
Tabel 2.2 Skala Interval Rasio Ketergantungan	22
Tabel 2.3 Skala Interval Rasio Efektivitas PAD	22
Tabel 2.4 Skala Interval Rasio Efisiensi	23
Tabel 2.5 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi	24
Tabel 4.1 Hasil Analisis Kemandirian Keuangan Daerah.....	31
Tabel 4.2 Hasil Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah	32
Tabel 4.3 Hasil Analisis Efektivitas PAD.....	33
Tabel 4.4 Hasil Analisis Efisiensi Keuangan Daerah.....	34
Tabel 4.5 Hasil Analisis Pertumbuhan Pendapatan.....	35
Tabel 4.6 Hasil Analisis Varians Anggaran Pendapatan.....	36
Tabel 4.7 Hasil Analisis Derajat Desentralisasi	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lambang Kota Bogor	29
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Realisasi adalah langkah yang perlu dilakukan agar sesuatu menjadi nyata, serta pelaksanaan yang konkret untuk mencapai hasil yang diinginkan. Realisasi anggaran adalah tahap pelaksanaan dari semua rencana dan alokasi yang telah ditetapkan oleh organisasi publik (Assidiqi, 2016). Tujuan dari realisasi anggaran adalah memastikan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan dikelola secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Realisasi anggaran merupakan tahap implementasi dari perencanaan anggaran yang dilakukan sebelumnya, setiap pengeluaran dalam realisasi anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta dilaporkan kepada masyarakat agar penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah menetapkan sasaran kinerja untuk setiap pendapatan dan belanja daerah, baik di tingkat daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun untuk program dan kegiatan tertentu. Pendapatan daerah seharusnya sesuai dengan seluruh anggaran yang telah ditetapkan agar pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan berbagai program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan realisasi pendapatan yang optimal, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan layanan publik, infrastruktur, dan pembangunan daerah secara efektif. Di sisi lain, belanja seharusnya tidak direalisasikan seluruh anggaran, karena hal ini dapat mengindikasikan adanya pemborosan atau penggunaan dana yang tidak efisien. Dengan tidak menghabiskan seluruh anggaran, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sisa dana untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak atau untuk cadangan di masa depan, sehingga menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja realisasi anggaran yang baik menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Ketika pendapatan lebih tinggi

dan belanja lebih rendah, pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Hal ini juga berkontribusi pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, harapan akan kondisi kinerja ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan pemerintah daerah dalam jangka panjang.

DPRD Kota Bogor telah secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 21 November 2022. Berdasarkan persetujuan dari semua anggota DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), APBD 2023 menunjukkan peningkatan sebesar Rp500 miliar dibandingkan tahun lalu. Ketua DPRD Atang Trisnanto, mengungkapkan bahwa peningkatan ini didorong oleh tambahan biaya transfer daerah dan penetapan yang lebih cepat dari target yang telah ditentukan pada 30 November.

Atang menekankan bahwa kenaikan APBD ini menjadi sinyal positif untuk Pemerintah Kota Bogor, yang diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mengatasi berbagai masalah mendasar masyarakat. APBD 2023 juga merupakan anggaran terakhir bagi Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie Rachim, yang akan difokuskan pada penyelesaian visi dan misi pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Dalam kerangka RPJMD, terdapat tiga misi utama yang harus dicapai: Kota Bogor Sehat, Kota Bogor Cerdas, dan Kota Bogor Sejahtera. Atang mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti belum meratanya akses BPJS, kurangnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, serta kebutuhan akan sekolah negeri yang memadai. Selain itu, dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan juga menjadi perhatian utama.

DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan dalam APBD 2023, termasuk penyelesaian Masjid Agung dan permasalahan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan target pendapatan mencapai Rp3,08 triliun,

yang terdiri dari pendapatan transfer daerah sebesar Rp1,5 triliun, pendapatan asli daerah Rp1,3 triliun, dan pembiayaan daerah Rp280 miliar, seluruh pendapatan ini direncanakan untuk membiayai belanja daerah yang besarnya setara. Secara keseluruhan, penetapan APBD 2023 diharapkan dapat mendorong pencapaian target pembangunan yang lebih baik dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, sehingga Kota Bogor dapat menjadi kota yang lebih baik dan ramah keluarga.

Laporan realisasi anggaran daerah memberikan informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Hasiara (2009), pendapatan daerah mencakup semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan ini dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan sah lainnya. Belanja daerah merujuk pada semua pengeluaran kas yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu, yang dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, yang juga dikelompokkan menjadi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Alfiani et al. (2024), dalam studi “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017-2022”. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efektif, dengan rata-rata 115,43%. Sementara itu, rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang efisien, dengan rata-rata 61,47%. Rasio pertumbuhan pendapatan positif sebesar 7,50%. Di sisi lain, rasio derajat desentralisasi berada pada kategori sedang, dengan nilai rata-rata 39,98%, sedangkan rasio ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi, mencapai 54,35%. Terakhir, rasio kemandirian dikategorikan partisipatif, dengan rata-rata 73,63%, yang menggambarkan adanya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendanaan daerah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Faisal (2024), dalam studi “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2018-2023”. Rasio efektivitas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil yang sangat efektif, dengan rata-rata mencapai 103%. Sementara itu, rasio efisiensi dinyatakan cukup efisien dengan rata-rata sebesar 94%. Rasio pertumbuhan pendapatan positif sebesar 7%. Di sisi lain, rasio derajat desentralisasi berada pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 57%, dan rasio ketergantungan menunjukkan tingkat yang tinggi, mencapai 47,55%. Terakhir, rasio kemandirian dikategorikan delegatif, dengan hasil rata-rata 137%, yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang signifikan dalam mendukung pendanaan daerah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Syukri et al. (2022), dalam studi “Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018-2020”. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan efektif dengan rata-rata mencapai 92,23%. Sementara itu, rasio efisiensi menunjukkan hasil yang sangat efisien dengan rata-rata sebesar 12,28%. Rasio pertumbuhan pendapatan positif sebesar 12,56%. Di sisi lain, rasio derajat desentralisasi dinyatakan kurang dengan nilai rata-rata 13,48%, sedangkan rasio ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi mencapai 84,50%. Terakhir, rasio kemandirian dikategorikan instruktif dengan rata-rata 16,41%, yang menunjukkan perlunya arahan yang lebih jelas dalam meningkatkan kemandirian finansial daerah.

Pentingnya analisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang pengelolaan pendapatan dan belanja oleh pemerintah daerah, serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin timbul. Hal ini sangat penting mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Analisis kinerja APBD merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Khususnya bagi Pemerintah Kota Bogor, yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. APBD berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengalokasian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan program pemerintah.

Alasan penulis memilih Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah karena kota ini merupakan salah satu kota besar di Jawa Barat, dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan dan dinamika sosial ekonomi yang kompleks, yang mempengaruhi kebutuhan layanan publik dan alokasi anggaran. Kota Bogor memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang menjadi sumber pendapatan daerah. Pada tahun 2019–2023, Kota Bogor menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dengan menganalisis realisasi anggaran selama periode ini, dapat dievaluasi bagaimana Pemerintah Kota Bogor menyesuaikan strategi keuangannya untuk menghadapi tantangan yang ada, serta bagaimana respons kebijakan anggaran tersebut terhadap kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Pemerintah Kota Bogor, maka penulis tertarik menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2023”**

1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah penelitian dalam penulisan Tugas Akhir adalah mengenai kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bogor tahun 2019-2023. Oleh karena itu, cakupan pembahasan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor selama periode 2019-2023?
2. Bagaimana ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor selama periode 2019-2023?
3. Bagaimana kinerja realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor dilihat dari tingkat efektivitas pendapatan selama periode 2019-2023?
4. Bagaimana kinerja realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor dilihat dari

tingkat efisiensi selama periode 2019-2023?

5. Bagaimana kinerja realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor dilihat dari tingkat pertumbuhan pendapatan selama periode 2019-2023?
6. Bagaimana kinerja realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor dilihat dari varians anggaran pendapatan selama periode 2019-2023?
7. Bagaimana kinerja realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor dilihat dari derajat desentralisasi selama periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur dan menilai kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor.
2. Mengukur dan menilai ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor.
3. Mengukur dan menilai efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Kota Bogor.
4. Mengukur dan menilai efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor.
5. Mengukur dan menilai tingkat pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bogor.
6. Mengukur dan menilai varians anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kota Bogor.
7. Mengukur dan menilai derajat desentralisasi daerah Pemerintah Kota Bogor.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi dunia akademik

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang perbandingan antara teori dan praktik, serta menambah referensi yang dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya mengenai realisasi anggaran.

2. Manfaat bagi pemerintah daerah

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi, serta meningkatkan kinerja pengelolaan APBD di masa mendatang.

3. Manfaat bagi pembaca

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kinerja realisasi anggaran pemerintah daerah dan sebagai referensi untuk pembuatan tugas akhir.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri Nomor 65 Tahun 2007, pemerintah daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menekankan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah merupakan struktur pemerintahan yang dibentuk berdasarkan prinsip desentralisasi, yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anangkota, 2017). Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik di suatu wilayah tertentu (Sugiyono, 2018).

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan serangkaian laporan yang disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi dan kinerja keuangan dalam periode tertentu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menggambarkan keadaan keuangan selama periode tertentu (Mahmudi, 2019). Selain itu, laporan ini harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan serta pengambilan keputusan (Kemenkeu RI, 2020).

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan publikasi adalah ringkasan dari data keuangan organisasi yang telah disusun, diklasifikasikan, dan dikelompokkan (Mahmudi, 2019). Oleh karena itu, untuk menilai apakah kondisi keuangan suatu organisasi tergolong sehat atau tidak, dapat merujuk pada laporan keuangannya. Berikut adalah tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah:

1. Memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
2. Menjadi alat akuntabilitas publik.
3. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Tujuan laporan keuangan menurut SAP

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Adapun cara penyajiannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang posisi sumber daya ekonomi serta ekuitas pemerintah.
2. Memberikan informasi tentang perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, serta ekuitas pemerintah.
3. Memberikan informasi tentang sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan.
5. Memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kas.
6. Memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintah.
7. Memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.2.3 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Banyak pihak masih menganggap laporan keuangan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan, sehingga publikasinya tidak dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Keputusan investasi sering kali dipengaruhi oleh faktor lain, seperti keamanan, stabilitas politik, dan infrastruktur, bukan oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Rendahnya budaya akuntabilitas dan pembuatan laporan keuangan menjadi salah satu penyebab kurangnya pemanfaatan laporan tersebut. Selain itu, sikap emosional masyarakat dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik mengurangi efektivitas laporan keuangan (Mahmudi, 2019). Namun, jika laporan keuangan dipelajari dengan kritis, pembaca akan menemukan informasi penting yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

Manfaat penyajian laporan keuangan secara spesifik meliputi:

1. Menyediakan informasi keuangan untuk menilai dan memperkirakan kesehatan keuangan pemerintah, yang meliputi tingkat likuiditas, leverage, solvabilitas, surplus/defisit, serta kesinambungan fiskal.
2. Menyediakan informasi keuangan untuk memantau kinerja, kesesuaian dengan peraturan, kontrak yang telah disepakati, serta ketentuan lainnya.
3. Menyediakan informasi untuk menilai dan memperkirakan kondisi ekonomi suatu pemerintahan serta perubahan yang telah dan akan terjadi.
4. Menyediakan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
5. Menyediakan informasi untuk menilai kinerja manajerial serta organisasional:
 - a. Mengidentifikasi biaya program, fungsi, dan aktivitas untuk mempermudah analisis serta perbandingan dengan kriteria yang telah ditentukan, dan membandingkan dengan kinerja periode sebelumnya atau unit pemerintah lainnya
 - b. Menilai tingkat ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dari operasi, program, aktivitas, serta fungsi tertentu dalam pemerintahan.
 - c. Menilai tingkat pemerataan dan keadilan (*equity & equality*).
 - d. Menilai hasil (*outcome*) dari suatu program, aktivitas, dan fungsi, serta efektivitas dalam mencapai tujuan dan target.

2.2.4 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya (Mahmudi, 2019). Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah dianggap berkualitas jika memenuhi ciri-ciri berikut:

1. Relevan: Informasi dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan, yang mencakup:
 - a. *Predictive Value*: Laporan keuangan dapat membantu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa depan.
 - b. *Feedback Value*: Laporan keuangan berguna untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik yang berguna untuk perencanaan dan perbaikan di masa datang.
 - c. *Timeliness*: Laporan keuangan harus dipublikasikan tepat waktu. Nilai informasi akan berkurang jika disampaikan terlambat.
2. Andal (*Reliability*): Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya, tidak menyesatkan, dan bebas dari unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri berikut:
 - a. *Faithfulness of Presentation*: Laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan tidak mengandung manipulasi.
 - b. *Verifiability*: Informasi dalam laporan keuangan dapat dibuktikan kebenarannya melalui proses audit.
 - c. *Neutrality*: Laporan harus disajikan tanpa kecenderungan atau bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.
3. Dapat dibandingkan (*Comparability*): Laporan keuangan harus dapat digunakan untuk membandingkan kinerja masa lalu atau kinerja organisasi lain yang sejenis.
4. Dapat dipahami (*Understandability*): Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti oleh para pengguna laporan.

2.2.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2019), laporan keuangan utama yang perlu disusun oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Menyediakan informasi yang membandingkan realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk setiap fungsi, organisasi dan kategori selama satu tahun anggaran.
2. Neraca: Menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran.
3. Laporan Arus Kas (LAK): Memberikan informasi tentang aliran kas yang berhubungan dengan kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan, yang mencakup saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Menyediakan informasi yang mencakup penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 65 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur pendapatan serta belanja daerah. APBD berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta memberikan layanan publik secara efisien dan efektif. Dokumen ini juga mencerminkan prioritas program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran (Mardiasmo, 2018).

2.3.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi: Menjadi dasar untuk pelaksanaan pendapatan dan

belanja di tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan: Berperan sebagai panduan bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan selama tahun tersebut.
3. Fungsi Pengawasan: Menjadi pedoman untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Fungsi Alokasi: Ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meminimalkan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi.
5. Fungsi Distribusi: Kebijakan APBD perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi: Berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan mencapai keseimbangan dalam perekonomian daerah.

2.3.3 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum: Berfungsi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.
2. Perencanaan dan Pengendalian: Sebagai alat perencanaan yang sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
3. Pelaksanaan Program: Menyediakan sumber daya untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
4. Pengawasan: Menjadi alat untuk pengawasan dalam penggunaan anggaran dan pencapaian target.
5. Keadilan dan Pemerataan: Mendorong keadilan dan pemerataan dalam pembangunan antar daerah.

2.3.4 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, struktur atau komponen APBD merupakan satu kesatuan yang mencakup:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD mencakup semua

penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dikembalikan oleh daerah, serta penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai peningkatan ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah: Penerimaan yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah dirinci berdasarkan jenis, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer: Dana yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer dirinci menurut jenis, meliputi:

- 1) Transfer pemerintah pusat

- (a) Dana perimbangan, terdiri atas rincian objek:

- i. Dana transfer umum, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
 - ii. Dana transfer khusus, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik.

- (b) Dana insentif daerah adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria spesifik.

- (c) Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk daerah yang memiliki otonomi khusus.

- (d) Dana keistimewaan adalah dana yang dialokasikan untuk daerah istimewa.

- (e) Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk desa serta di transfer langsung ke rekening kas desa. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah dan pembangunan desa.

- 2) Transfer antar daerah, yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

- 1) Pendapatan hibah adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha.
- 2) Dana darurat adalah dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang timbul akibat bencana serta tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah menggunakan sumber APBD.
- 3) Pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum yang tidak perlu dikembalikan dan diakui sebagai pengurang ekuitas, serta kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi: Pengeluaran untuk kegiatan rutin pemerintah daerah yang memberikan manfaat dalam jangka pendek, seperti belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja Modal: Dialokasikan untuk pengeluaran pengadaan aset tetap dan aset lainnya, seperti belanja tanah, belanja peralatan, belanja jalan, belanja irigasi, belanja gedung dan infrastruktur lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga: Dialokasikan untuk pengeluaran dalam situasi darurat, termasuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam dan kejadian luar biasa.
- d. Belanja Transfer: Pengeluaran dana dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau kepada pemerintah desa, seperti belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Penganggaran belanja ini dilakukan oleh SKPD sebagai SKPKD.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang harus dikembalikan dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran saat ini maupun tahun berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

- a. **Penerimaan Pembiayaan:** Jika diperkirakan terjadi defisit, pendanaan dapat diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditentukan dalam peraturan daerah, seperti pencairan dana cadangan, SiLPA, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan lainnya.
- b. **Pengeluaran Pembiayaan:** Dalam kasus surplus, dana tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran yang mendukung pembiayaan daerah, seperti pembayaran cicilan utang, penyertaan modal daerah, pemberian pinjaman daerah, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran lainnya.

4. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang pelaksanaan anggaran selama periode tertentu, termasuk rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta melakukan perbandingan dengan anggaran yang telah ditentukan (Mahmudi, 2019). Laporan ini menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja, serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja keuangan instansi pemerintah (Sugiyono, 2018).

2.4.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Mahmudi (2019), laporan realisasi anggaran memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar penyajian laporan tersebut bagi pemerintah untuk mencapai tujuan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara berdampingan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan sejauh mana

target yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif tercapai sesuai dengan ketentuan yang ada.

2.4.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi ini bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan cara:

1. Menyampaikan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;.
2. Menyampaikan informasi tentang realisasi anggaran secara keseluruhan, yang bermanfaat dalam menilai kinerja pemerintah terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi penting untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah di masa yang akan datang melalui penyajian laporan secara komparatif. Laporan ini memberikan informasi kepada pengguna mengenai indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu:

1. Dilaksanakan dengan cara yang efisien, efektif, dan hemat.
2. Dilaksanakan berdasarkan anggaran yang ditetapkan (APBN/APBD).
3. Dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

2.4.4 Elemen Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Mahmudi (2019), laporan realisasi anggaran terdiri dari enam elemen (pos) utama, yaitu : 1) pendapatan, 2) belanja, 3) transfer, 4) surplus/defisit, 5) pembiayaan, dan 6) SiLPA / SiKPA.

1. Pendapatan

Pendapatan daerah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

- a. Pendapatan asli daerah, mencakup:
 - 1) Pendapatan pajak daerah.
 - 2) Pendapatan retribusi daerah.
 - 3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan transfer, mencakup:
 - 1) Transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan.
 - (a) Dana bagi hasil pajak.
 - (b) Dana bagi hasil sumber daya alam.
 - (c) Dana alokasi umum.
 - (d) Dana alokasi khusus.
 - 2) Transfer pemerintah pusat lainnya.
 - (a) Dana otonomi khusus.
 - (b) Dana penyesuaian.
 - 3) Transfer pemerintah provinsi (khusus pemerintah kabupaten/kota).
 - (a) Pendapatan bagi hasil pajak.
 - (b) Pendapatan bagi hasil lainnya.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah, mencakup:
 - 1) Pendapatan hibah.
 - 2) Pendapatan dana darurat.
 - 3) Pendapatan lainnya.

2. Belanja

Pos belanja dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

- a. Belanja operasi, mencakup:
 - 1) Belanja pegawai.
 - 2) Belanja bunga.
 - 3) Belanja barang.
 - 4) Belanja hibah.
 - 5) Belanja subsidi.
 - 6) Bantuan sosial.

- b. Belanja modal, mencakup:
 - 1) Belanja tanah.
 - 2) Belanja peralatan dan mesin.
 - 3) Belanja gedung dan bangunan.
 - 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan.
 - 5) Belanja aset tetap lainnya.
- c. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak terjadi secara berulang, mencakup:
 - 1) Bantuan bencana alam.
 - 2) Bantuan bencana sosial.
 - 3) Bantuan korban politik.

3. Transfer

Transfer pada dasarnya merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Bagi pemerintah provinsi, pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota mencakup:

- a. Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota.
- b. Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota.
- c. Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota.

Untuk pemerintah Kabupaten/Kota, pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil pendapatan ke Desa mencakup:

- a. Bagi hasil pajak.
- b. Bagi hasil retribusi.
- c. Bagi hasil pendapatan lainnya alokasi dana desa.

4. Surplus/Defisit

Selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/ defisit. Surplus adalah selisih positif antara pendapatan dan belanja dalam satu periode anggaran, sedangkan defisit adalah selisih negatif antara pendapatan dan belanja dalam satu periode anggaran.

5. Pembiayaan

Pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran

pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat pada pos pembiayaan neto.

a. Penerimaan pembiayaan, mencakup:

- 1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.
- 2) Pencairan dana cadangan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat.
- 5) Pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya.
- 6) Pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bank.
- 7) Pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bukan bank.
- 8) Pinjaman dalam negeri pengeluaran obligasi pemerintah daerah.
- 9) Pinjaman dalam negeri lainnya.
- 10) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.
- 11) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.
- 12) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.

b. Pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- 1) Pembentukan dana cadangan.
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah.
- 3) Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat.
- 4) Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.
- 5) Pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
- 6) Pembayaran pokok pinjaman obligasi pemerintah pusat.
- 7) Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya.
- 8) Pemberian pinjaman kepada perusahaan negara.
- 9) Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah.
- 10) Pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.

6. SiLPA/SiKPA

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran. SiLPA/SiKPA dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai pada pos surplus/defisit dan pos pembiayaan neto.

2.5 Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Salah satu aspek penting dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang perlu diukur serta dievaluasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan atau merealisasikan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dianalisis melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan memanfaatkan berbagai rasio keuangan, di antaranya sebagai berikut:

2.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian mencerminkan tingkat ketergantungan daerah pada sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah pada bantuan dari pihak luar, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi (Amin, 2015). Semakin besar rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut (Halim, 2012). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian (Mahmudi, 2019).

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Skala Interval Rasio Kemandirian

Rasio (%)	Kriteria	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah	Instruktif
25% - 50%	Cukup	Konsultif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2012)

2.5.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada dukungan dari pemerintah provinsi atau pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan (Mahmudi, 2019).

$$\text{Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Skala Interval Rasio Ketergantungan

Rasio (%)	Kriteria
< 10%	Sangat rendah
10% - 20%	Rendah
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup
40% - 50%	Tinggi
> 50%	Sangat tinggi

Sumber: Banga (2017)

2.5.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat direalisasikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja pemerintah daerah (Miharja et al., 2020). Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas (Mahmudi, 2019).

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Rasio (%)	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang efektif
< 75%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

2.5.4 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instansi atau perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal (Mardiasmo, 2018). Semakin kecil nilai rasio ini, semakin efisien kinerja pemerintah daerah. Berikut adalah

rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi (Mahmudi, 2019).

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.4 Skala Interval Rasio Efisien

Rasio (%)	Kriteria
> 100%	Tidak efisien
90% - 100%	Cukup efisien
80% - 90%	Kurang efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat efisien

Sumber: Mahmudi (2019)

2.5.5 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan merupakan kondisi yang menunjukkan adanya perbaikan atau perkembangan, yang bermanfaat untuk menentukan apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif atau negatif selama tahun anggaran berjalan (Rahayu et al., 2019). Analisis pertumbuhan pendapatan umumnya dilakukan untuk mengidentifikasi kecenderungan, baik berupa peningkatan maupun penurunan kinerja selama periode tertentu. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan pendapatan (Mahmudi, 2019).

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

2.5.6 Rasio Varians Anggaran Pendapatan

Analisis varians umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi perbedaan antara anggaran dan realisasi (Mahmudi, 2019). Pemerintah daerah dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik jika mampu mengumpulkan pendapatan melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika realisasi pendapatan berada di bawah anggaran, kinerjanya dinilai kurang memuaskan (Ramadani, 2016). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio varians anggaran pendapatan (Mahmudi, 2019).

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

2.5.7 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan (Rahayu et al., 2019). Rasio derajat desentralisasi mencerminkan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio tingkat desentralisasi (Mahmudi, 2019).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.5 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio (%)	Kriteria
< 10%	Sangat kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Cukup
30% - 40%	Sedang
40% - 50%	Baik
> 50%	Sangat baik

Sumber: Pasaribu et al. (2021)

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian merupakan proses sistematis dan objektif untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data, dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dalam penyusunan Tugas Akhir, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Hasan (2004), menjelaskan bahwa analisis deskriptif adalah tipe analisis data dalam penelitian yang digunakan untuk menguji generalisasi hasil berdasarkan satu sampel. Sugiyono (2018), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai dari satu atau lebih variabel independen, tanpa membuat perbandingan atau mengaitkannya dengan variabel lain. Sementara itu, Sukmadinata (2017) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang ada, baik yang bersifat alami maupun yang dihasilkan oleh manusia, termasuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, serta persamaan atau perbedaan antara satu fenomena dan fenomena lainnya.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor. Subjek penelitian adalah batasan yang ditetapkan dalam penelitian, yang dapat ditentukan oleh peneliti melalui benda, hal, atau orang yang berhubungan dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 2019). Subjek penelitian mencakup elemen, individu, atau organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan untuk mengumpulkan data penelitian (Idrus, 2009).

Objek penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir adalah kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Objek penelitian adalah atribut atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang memiliki variabel

tertentu, yang ditentukan untuk dipelajari dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2018).

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data merupakan informasi atau bahan nyata yang dapat dijadikan landasan untuk kajian (analisis atau kesimpulan). Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan informasi yang disajikan dalam bentuk angka atau bilangan (Sugiyono, 2018). Sumber data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir adalah data sekunder. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data sekunder adalah data yang didapatkan oleh seorang peneliti bukan secara langsung dari objek, melainkan melalui sumber lain, baik berupa lisan maupun tulisan. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui orang lain seperti dokumen (Sugiyono, 2018). Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh data primer. Pada umumnya, data sekunder berbentuk file, catatan, dan dokumen. Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor yang diperoleh melalui <https://ppid.kotabogor.go.id>.

3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknik berarti metode atau sistem dalam melakukan sesuatu. Pengumpulan diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan mengumpulkan, perhimpunan, pengarah. Sementara itu, data berarti informasi atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir.

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data (Sugiyono, 2013). Berikut adalah teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan oleh penulis:

1. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dalam bentuk buku, dokumen, angka, arsip, dan gambar yang berupa laporan serta penjelasan yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2015). Dokumen yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir adalah laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Daerah Kota Bogor, yaitu <https://ppid.kotabogor.go.id>.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka melibatkan pengumpulan data dengan menganalisis buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan setelah masalah diselesaikan (Nazir, 2013). Bahan pustaka yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir mencakup Undang-Undang, buku literatur, peraturan lain, serta berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik dan masalah penelitian yang berkaitan dengan kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintahan Kota Bogor

4.1.1 Sejarah Kota Bogor

Warga Bogor umumnya percaya bahwa Kota Bogor memiliki keterkaitan geografis dengan Kota Pakuan, yang merupakan ibu kota Pajajaran. Berbagai sumber menjelaskan asal-usul dan makna Pakuan. Berikut adalah hasil penelusuran yang disusun menurut kronologi waktu:

1. Naskah Carita Waruga Guru (1750-an): Dalam naskah yang ditulis dalam bahasa Sunda Kuna ini, dijelaskan bahwa sebutan Pakuan Pajajaran berasal dari banyaknya pohon Pakujajar di lokasi tersebut.
2. K.F. Holle (1869): Dalam tulisannya, Holle menyebutkan bahwa di dekat Kota Bogor terdapat sebuah kampung bernama Cipaku dan sungai dengan nama yang sama, yang dipenuhi dengan pohon paku. Ia berpendapat bahwa nama Pakuan berkaitan dengan keberadaan Cipaku dan pohon paku, yang berarti "pohon paku yang berjajar."
3. G.P. Rouffaer (1919): Dalam ensiklopedia, Rouffaer menjelaskan bahwa Pakuan berarti "paku" atau "paku jagat," yang melambangkan raja, seperti dalam gelar Paku Buwono. Ia menafsirkan Pakuan sebagai "Maharaja" dan Pajajaran sebagai "berdiri sejajar" dengan Majapahit, menyimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran berarti "Maharaja yang setara dengan Majapahit," sejalan dengan pendapat Hoesein Djajaningrat.
4. R. N. Poerbatjaraka (1921): Dalam tulisannya, Poerbatjaraka menyatakan bahwa "Pakuan" berasal dari bahasa Jawa Kuno "pakwwan" yang berarti istana atau kemah. Ia menyimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran berarti "istana yang berjajar."
5. H. Ten Dam (1957): Ten Dam meneliti aspek sosial-ekonomi dengan pendekatan sejarah. Dalam karyanya, ia mengaitkan "Pakuan" dengan "lingga" sebagai tanda kekuasaan. Menurutnya, "Pakuan" lebih merupakan istilah umum untuk ibu kota, berbeda dengan keraton. Ia juga mencatat bahwa nama "Pajajaran" muncul karena aliran Sungai Ciliwung

dan Cisadane yang sejajar, sehingga Pakuan Pajajaran berarti "Pakuan di Pajajaran."

Kata "Pakuan," "Pajajaran," dan "Pakuan Pajajaran" dapat ditemukan dalam Prasasti Batutulis dan Prasasti Kebantenan yang terletak di Bekasi. Dalam naskah Carita Parahiyangan, terdapat penyebutan mengenai "Sang Susuktunggal" yang menciptakan tahta untuk Sri Baduga di Pakuan Pajajaran. "Pakuan" di sini merujuk pada tempat tinggal raja, yang umumnya dikenal sebagai keraton atau istana. Tafsiran Poerbatjaraka sejalan dengan makna yang terdapat dalam Carita Parahiyangan, yakni "istana yang berjajar," yang mungkin terdiri dari beberapa bangunan keraton.

Pendapat Ten Dam bahwa Pakuan berarti ibu kota benar dalam penggunaan, tetapi tidak tepat secara semantik. Laporan Tome Pires (1513) menyebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda adalah "Dayo," yang terletak di pegunungan dan perjalanan dari pelabuhan Kalapa, menunjukkan bahwa istilah "dayeuh" lebih umum digunakan untuk merujuk pada ibu kota dalam percakapan sehari-hari, sedangkan "pakuan" digunakan dalam konteks sastra.

4.1.2 Lambang Kota Bogor



Gambar 4.1 Lambang Kota Bogor

Terdapat beberapa warna : emas, merah, biru dan hijau

Arti dari masing-masing lambang adalah sebagai berikut:

1. Kiri atas: Burung Garuda berwarna kuning emas melambangkan Negara.
2. Kanan atas: Istana Bogor yang terletak di Kota Bogor diwakili oleh lukisan istana berwarna perak.
3. Kiri bawah: Kota Bogor tidak dapat dipisahkan dari bayangan Gunung Salak yang digambarkan dengan simbol gunung yang memiliki 4 puncak.

4. Kanan bawah: Kota Bogor merupakan warisan dari Kerajaan Pajajaran, yang dilambangkan dengan bentuk Kujang.

4.1.3 Visi dan Misi

Visi 2019–2024:

“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”

Misi:

1. Mewujudkan Kota yang Sehat.
2. Mewujudkan Kota yang Cerdas.
3. Mewujudkan Kota yang Sejahtera.

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Bogor

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, tugas utama dan fungsi Pemerintah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota mencakup urusan yang berskala kabupaten/kota, meliputi:
 - a. Perencanaan dan pengelolaan pembangunan.
 - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat.
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana publik.
 - e. Penanganan di bidang kesehatan.
 - f. Penyelenggaraan pendidikan.
 - g. Penanganan masalah sosial.
 - h. Pelayanan di bidang ketenagakerjaan.
 - i. Fasilitasi pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah.
 - j. Pengelolaan lingkungan hidup.
 - k. Pelayanan di bidang pertanahan.
 - l. Pelayanan di bidang kependudukan, dan catatan sipil.
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
 - n. Pelayanan administrasi untuk penanaman modal.
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
 - p. Urusan wajib lain yang ditetapkan oleh peraturan undang-undang.

2. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan mencakup urusan yang secara nyata ada dan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan keunggulan daerah tersebut.
3. Pelaksanaan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Dalam menjalankan otonomi, daerah memiliki hak:
 - a. Mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri.
 - b. Memilih pemimpin daerah.
 - c. Mengelola aparatur daerah.
 - d. Mengelola kekayaan daerah.
 - e. Memungut pajak dan retribusi daerah.
 - f. Menerima bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya lainnya yang ada di daerah.
 - g. Menerima sumber pendapatan lain yang sah.
 - h. Mendapatkan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4.2 Analisis Data dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Berikut ini adalah hasil analisis rasio kemandirian daerah Pemerintah Kota Bogor:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2019	1.015.884.216.919,86	1.455.644.350.874,00	69,79	Sedang	Partisipatif
2020	872.017.242.152,12	1.415.498.666.396,00	61,60	Sedang	Partisipatif
2021	1.075.240.926.213,11	1.463.000.794.326,00	73,50	Sedang	Partisipatif
2022	1.147.623.045.708,92	1.639.426.533.844,00	70,00	Sedang	Partisipatif
2023	1.338.618.268.168,80	1.628.857.302.371,00	82,18	Tinggi	Delegatif
Rata-Rata			71,41	Sedang	Partisipatif

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio kemandirian daerah Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 berada pada kriteria "sedang" dengan rasio rata-rata mencapai 71,41%. Kriteria "sedang" menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kota Bogor dalam mengelola urusan pemerintah dan keuangan daerah masih dalam tahap yang cukup, namun belum sepenuhnya mandiri. Pola hubungan yang terjalin dengan pemerintah pusat adalah "partisipatif", yang berarti ada keterlibatan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat, namun dengan kecenderungan daerah semakin mampu untuk berinisiatif dan mengelola berbagai hal secara lebih mandiri.

Tingkat kemandirian terendah tercatat sebesar 61,60% pada tahun 2020 dengan kriteria "sedang" dan pola hubungan "partisipatif", yang disebabkan oleh dampak besar dari pandemi COVID-19. Krisis kesehatan global tersebut mengganggu sektor ekonomi dan pemerintahan, mengakibatkan daerah Kota Bogor kesulitan dalam mengelola keuangan dan sumber daya secara mandiri. Namun, pada tahun 2023, tingkat kemandirian daerah mengalami peningkatan signifikan mencapai 82,18% dengan kriteria "tinggi" dan pola hubungan "delegatif". Hal ini dapat diartikan sebagai dampak dari pemulihan ekonomi setelah pandemi, di mana daerah mulai berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperbaiki pengelolaan keuangan.

4.2.2 Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Berikut ini adalah hasil analisis rasio ketergantungan daerah Pemerintah Kota Bogor:

Tabel 4.2 Hasil Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Total Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	1.455.644.350.874,00	2.559.857.207.793,86	56,86	Sangat tinggi
2020	1.415.498.666.396,00	2.428.579.503.649,12	58,29	Sangat tinggi
2021	1.463.000.794.326,00	2.644.780.935.777,11	55,32	Sangat tinggi
2022	1.639.426.533.844,00	2.787.105.058.802,92	58,82	Sangat tinggi
2023	1.628.857.302.371,00	2.967.475.570.539,80	54,89	Sangat tinggi
Rata-Rata			56,84	Sangat tinggi

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio ketergantungan daerah Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 berada pada kriteria "sangat tinggi" dengan rata-rata rasio mencapai 56,84%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor masih sangat bergantung pada sumber pendapatan dari luar daerah. Dalam periode lima tahun terakhir, ketergantungan ini terlihat jelas, mencerminkan bahwa pendapatan daerah sebagian besar berasal dari transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bogor masih banyak bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pendapatan. Ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer dapat menjadi tantangan dalam pembangunan daerah karena membuat anggaran daerah rentan terhadap perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Bogor untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer, sehingga dapat mencapai kemandirian keuangan dan meningkatkan daya saing daerah.

4.2.3 Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini adalah hasil analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Bogor:

Tabel 4.3 Hasil Analisis Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	1.015.884.216.919,86	972.607.288.978,00	104,45	Sangat efektif
2020	872.017.242.152,12	741.531.123.201,00	117,60	Sangat efektif
2021	1.075.240.926.213,11	914.550.650.320,00	117,57	Sangat efektif
2022	1.147.623.045.708,92	1.150.887.225.486,00	99,72	Cukup efektif
2023	1.338.618.268.168,80	1.403.260.832.834,00	95,39	Cukup efektif
Rata-Rata			106,95	Sangat efektif

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kriteria yang "sangat efektif" dengan rata-rata rasio mencapai 106,95%. Hal ini menandakan pemerintah daerah berhasil memaksimalkan sumber pendapatan asli dalam mendukung pembangunan pelayanan publik. Tahun 2020 mencatat rasio efektivitas tertinggi mencapai 117,60%. Angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor berhasil mencapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, walaupun terdapat penyesuaian target dimasa pandemi.

Di sisi lain, rasio efektivitas terendah tercatat pada tahun 2023 mencapai 95,39%. Meskipun tergolong "sangat efektif", penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan PAD, yang mungkin disebabkan faktor-faktor seperti penurunan ekonomi, perubahan kebijakan, atau dampak dari situasi eksternal lainnya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dalam rasio efektivitas PAD, Pemerintah Kota Bogor tetap menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mempertahankan dan meningkatkan rasio efektivitas di masa depan.

4.2.4 Analisis Efisiensi Keuangan Daerah

Berikut ini adalah hasil analisis rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor:

Tabel 4.4 Hasil Analisis Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	2.526.504.949.919,19	2.559.857.207.793,86	98,70	Cukup efisien
2020	2.353.736.171.982,00	2.428.579.503.649,12	96,92	Cukup efisien
2021	2.636.065.820.905,00	2.644.780.935.777,11	99,67	Cukup efisien
2022	2.984.193.683.003,00	2.787.105.058.802,92	107,07	Tidak efisien
2023	3.027.354.930.109,00	2.967.475.570.539,80	102,02	Tidak efisien
Rata-Rata			100,88	Tidak efisien

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio efisiensi daerah Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan rata-rata rasio

mencapai 100,88%, yang dikategorikan sebagai "tidak efisien". Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah hampir mencapai titik efisiensi, masih terdapat ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran. Selama empat tahun terakhir, adanya peningkatan belanja daerah yang lebih cepat daripada peningkatan pendapatan. Meskipun pendapatan daerah meningkat, kenaikannya tidak cukup untuk mengimbangi laju kenaikan belanja.

Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan pengelolaan anggaran agar belanja lebih sejalan dengan pendapatan daerah. Tanpa perbaikan, hal ini dapat berdampak negatif pada keberlanjutan keuangan daerah dan pelayanan publik. Diharapkan Pemerintah Kota Bogor dapat mengembangkan strategi efektif untuk memperbaiki pengelolaan pendapatan dan mengurangi belanja, sehingga menciptakan efisiensi anggaran, dan meningkatkan rasio efisiensi ke kategori "sangat efisien" di masa mendatang.

4.2.5 Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Berikut ini adalah hasil analisis pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bogor:

Tabel 4.5 Hasil Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Pendapatan pada tahun t (Rp)	Pendapatan pada tahun t-1 (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	2.559.857.207.793,86	2.328.703.432.668,85	9,93	Positif
2020	2.428.579.503.649,12	2.559.857.207.793,86	-5,13	Negatif
2021	2.644.780.935.777,11	2.428.579.503.649,12	8,90	Positif
2022	2.787.105.058.802,92	2.644.780.935.777,11	5,38	Positif
2023	2.967.475.570.539,80	2.787.105.058.802,92	6,47	Positif
Rata-Rata			5,11	Positif

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 termasuk dalam kategori "positif" dengan rata-rata rasio mencapai 5,11%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah tersebut mengalami peningkatan yang baik selama periode tersebut. Namun, meskipun hasilnya positif,

Pemerintah Kota Bogor perlu terus meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, untuk memastikan pertumbuhan pendapatan tetap positif, penting bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada.

Pertumbuhan pendapatan Kota Bogor menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan variasi yang signifikan dalam tingkat pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pemerintah Kota Bogor mengalami pertumbuhan pendapatan negatif yaitu -5,13%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah. Sebaliknya, tahun 2021 pertumbuhan pendapatan tertinggi mencapai 8,90%. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat setelah periode sulit sebelumnya, di mana pemerintah telah berhasil mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan seperti peningkatan pemungutan pajak.

4.2.6 Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Berikut ini adalah hasil analisis varians anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kota Bogor:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Selisih	Rasio (%)
2019	2.559.857.207.793,86	2.639.970.560.688,00	- 80.113.352.894,14	96,97
2020	2.428.579.503.649,12	2.362.959.267.805,00	65.620.235.844,12	102,78
2021	2.644.780.935.777,11	2.482.148.757.721,00	162.632.178.056,11	106,55
2022	2.787.105.058.802,92	2.824.140.344.471,00	- 37.035.285.668,08	98,69
2023	2.967.475.570.539,80	3.059.704.221.734,00	- 92.228.651.194,20	96,99
Rata-Rata			3.775.024.828,76	100,39

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil analisis di atas, varians anggaran pendapatan Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan rata-rata sebesar Rp3.775.024.828,20, dengan rasio mencapai 100,39%. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, realisasi pendapatan hampir sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Bogor mampu

mengelola pendapatan dengan baik, rasio tersebut mencerminkan usaha dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang relatif efektif.

Selisih tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar Rp162.632.178.056,11 dengan rasio mencapai 106,55%, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan melebihi anggaran yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena kenaikan target anggaran yang relatif kecil dari tahun sebelumnya yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan selama fase awal pemulihan pasca-pandemi. Sebaliknya, pada tahun 2022 mencatat selisih negatif sebesar -Rp37.035.285.668,08 dengan rasio mencapai 98,69% yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan berada sedikit dibawah target anggaran. Penurunan ini disebabkan oleh adanya kenaikan target yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menunjukkan sikap optimis dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

4.2.7 Analisis Derajat Desentralisasi

Berikut ini adalah hasil analisis rasio derajat desentralisasi daerah Pemerintah Kota Bogor:

Tabel 4.7 Hasil Analisis Derajat Desentralisasi

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2019	1.015.884.216.919,86	2.559.857.207.793,86	39,69	Sedang
2020	872.017.242.152,12	2.428.579.503.649,12	35,91	Sedang
2021	1.075.240.926.213,11	2.644.780.935.777,11	40,66	Baik
2022	1.147.623.045.708,92	2.787.105.058.802,92	41,18	Baik
2023	1.338.618.268.168,80	2.967.475.570.539,80	45,11	Baik
Rata-Rata			40,51	Baik

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 berada pada kriteria "baik" dengan rasio mencapai 40,51%. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah berhasil menerapkan prinsip desentralisasi secara efektif yang memungkinkan pengelolaan lebih otonom dan responsif

terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terkait pembangunan dan pelayanan publik dengan lebih cepat dan tepat berkat tingkat desentralisasi yang baik.

Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor mampu mengelola tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan baik. Rasio derajat desentralisasi yang stabil dan positif menjadi indikator penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah daerah. Langkah strategis perlu terus diambil untuk mempertahankan bahkan meningkatkan derajat desentralisasi sehingga dapat lebih memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bogor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, rasio kemandirian daerah Pemerintah Kota Bogor menunjukkan kriteria “sedang” dengan rata-rata 71,41% yang menandakan bahwa Kota Bogor belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan keuangan meskipun mengalami kemajuan. Rasio ketergantungan yang sangat tinggi mencapai 56,84% pada sumber pendapatan luar daerah. Sementara itu, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efektif yaitu mencapai 106,95% yang mencerminkan adanya keberhasilan dalam memaksimalkan sumber pendapatan meskipun rasio efisiensi berada pada angka 100,88% sehingga hal ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran. Pertumbuhan pendapatan yang positif mencapai 5,11% dan varians anggaran yang mencapai 100,39% menunjukkan pengelolaan yang cukup baik. Derajat desentralisasi yang mencapai 40,51% mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Bogor, dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer. Langkah ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dipertahankan serta ditingkatkan lagi. Hal ini penting agar sumber pendanaan daerah tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Selain itu, evaluasi kebijakan pengelolaan anggaran juga perlu dilakukan agar belanja lebih sejalan dengan pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi

ketidakefisienan dalam realisasi belanja dan pendapatan yang sering menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan kemandirian keuangan Kota Bogor dapat meningkat, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi berkurang, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat, dan pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dalam beberapa tahun ke depan.

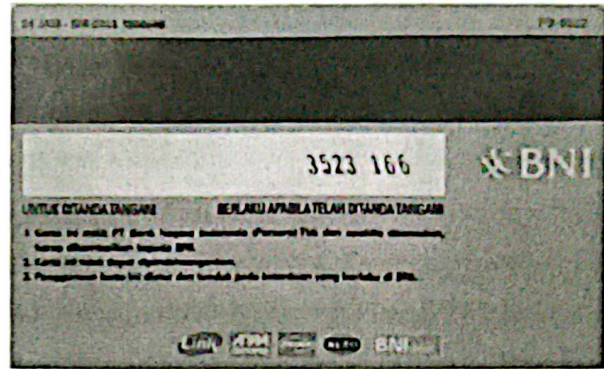
2. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian serupa, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian mengenai kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bogor agar menjadi lebih komprehensif. Peneliti berikutnya juga diharapkan untuk menambahkan atau menggunakan pendekatan yang berbeda dari yang telah digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat memberi gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A., Armeliza, D., & Nasution, H. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*. 1(2). 74-87.
- Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 4(1). 80-91.
- Anangkota, M. (2017). Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3(2). 148-152.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*. 4(5).
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Faisal, F. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018-2023. *Online Repository of Universitas NU Kalimantan Selatan*. 1-9.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, S., Putri, M. O., Dwitara, H. Y., & Puspasari, A. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Pemerintahan Di Kota Bekasi Tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*. 7(2). 279-286.
- Hasan, I. (2004). *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasiara, L. O. (2009). *Akuntansi Sektor Publik (Teori & Praktik, Bernuansa Keperilakuan)*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Miharja, E. S., Handajani, L., & Furkan, L. M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. *Indonesia Accounting Journal*. 2(2). 148-161.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Pasaribu, E., Septriani, S., Benardin, B., & Febriani, R. E. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal*. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.12054>
- Rahayu, Y. K. F., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014–2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. 15.
- Ramadani, R. F. (2016). Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. *Ekonomia*. 5(3). 327-345.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syukri, M., Pahmi, S., & Suandi, S. (2022). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. 2(1). 01-07.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, jam 15.14 WIB.
- <https://megapolitan.antaranews.com/berita/221697/dprd-kota-bogor-tetapkan-apbd-2023-anggaran-difokuskan-tuntaskan-rpjmd>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2024, jam 20.30 WIB.
- <https://ppid.kotabogor.go.id/>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, jam 17.14 WIB.
- _____. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. (2008). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- _____. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022*.
- _____. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

LAMPIRAN



DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GANJIL TA. 2024/2025

Dosen pembimbing	:	Stephanus Andi Adityaputra, S.E., M.Acc.
Nama Mahasiswa	:	VIONY MONICA RATU
Nomor Mahasiswa	:	2022125783
Tempat PKL	:	-

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mhs.
1	Selasa	24/09/24	Bimbingan awal	Viony
2	Senin	30/09/24	Analisis artikel	Viony
3	Senin	7/10/24	Membahas dan revisi bab 1, ^{tulis} bab 2	Viony
4	Selasa	15/10/24	Revisi bab 1-3 dan melanjutkan bab 4	Viony
5	Senin	11/10/24	Diskusi bab 4 dan melengkapi bab 4	Viony
6	Selasa	26/11/24	Diskusi format bab 2, bab 4, dan Bab 5	Viony
7	Kamis	5/12/24	Review dan finalisasi TA	Viony
8	Selasa	10/12/24	Finalisasi dan ACC TA	Viony
9				
10				

Dosen Pembimbing I,



Stephanus Andi Adityaputra, S.E., M.Acc.

Wakil Direktur Bidang Akademik,

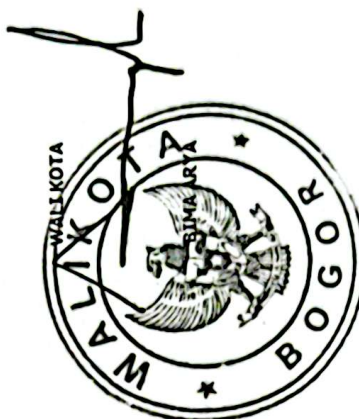


Dr. Nung Harjanto., S.E., M.A.A.C., Ak., CA

PEMERINTAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2018 (AUDITED)
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	972.607.288.978,00	1.015.884.216.919,86	104,45	912.197.971.288,85
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	644.546.554.586,00	689.543.006.040,00	106,98	592.978.746.862,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1	53.446.789.400,00	51.362.153.192,00	96,10	48.418.070.315,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1	28.083.707.761,00	28.241.844.911,00	100,56	26.772.427.406,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1	246.530.237.231,00	246.737.212.776,86	100,08	244.028.776.705,85
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.577.997.671.710,00	1.455.644.350.874,00	92,25	1.303.332.063.609,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2	1.162.190.020.000,00	1.106.494.405.814,00	95,21	1.066.762.734.201,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	73.713.874.000,00	53.495.246.384,00	72,57	70.988.926.350,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2	27.816.418.000,00	24.159.177.895,00	86,85	23.969.468.586,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2	856.297.349.000,00	838.948.449.000,00	97,97	791.929.143.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2	204.362.379.000,00	189.891.532.535,00	92,92	179.875.196.265,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	100,00	0,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.1.1.2	41.073.011.000,00	41.073.011.000,00	100,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	100,61	236.569.329.408,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	250.615.369.110,00	252.139.954.160,00	100,61	236.569.329.408,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bantuan Keuangan	5.1.1.2	124.119.271.600,00	55.936.979.900,00	45,07	0,00
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.2	124.119.271.600,00	55.936.979.900,00	45,07	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	89.365.600.000,00	88.328.640.000,00	98,84	113.173.397.771,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	89.365.600.000,00	88.328.640.000,00	98,84	87.142.218.371,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	26.031.179.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.639.970.560.688,00	2.559.857.207.793,86	96,97	2.328.703.432.668,85
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.235.899.827.533,52	2.025.462.086.541,19	90,59	1.945.851.266.176,04
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1	1.303.512.672.792,52	1.181.889.361.829,00	90,67	1.108.690.038.689,00
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1	789.887.964.541,00	711.101.422.815,19	90,03	672.795.038.324,21
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1	7.000.000.000,00	6.578.046.142,00	93,97	6.598.058.977,83
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1	85.099.234.000,00	79.149.334.000,00	93,01	118.993.313.285,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1	50.399.956.200,00	46.743.921.755,00	92,75	38.774.816.900,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	630.349.995.579,00	501.033.407.778,00	79,48	455.461.723.593,00
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.2	23.520.000.000,00	18.044.020.000,00	76,72	9.314.649.200,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2	117.133.344.792,00	99.754.707.372,00	85,16	101.665.269.154,00
2.2.3	Belanja Pembangunan dan Gedung	5.1.2.2	162.100.280.110,00	144.703.165.317,00	89,27	66.483.846.768,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2	324.769.819.437,00	235.965.307.071,00	72,66	276.223.614.766,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2	2.109.630.240,00	1.910.823.018,00	90,58	1.774.343.705,00

NO URUT	URAIAN	REF	REKONSTRUKSI 2019	(AUDITED)	(%)	2018 (AUDITED)
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2	716.921.000,00	655.385.000,00	91,42	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	4.968.939.487,00	9.455.600,00	0,19	1.557.079.950,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	4.968.939.487,00	9.455.600,00	0,19	1.557.079.950,00
	JUMLAH BELANJA		2.871.218.762.599,52	2.526.504.949.919,19	87,99	2.402.870.069.719,04
2.4	TRANSFER					
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	5.1.3	0,00	0,00		3.716.867.124,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3	0,00	0,00		3.716.867.124,00
2.5	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.4	5.157.216.192,00	1.995.853.019,00	38,70	0,00
2.5.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.4	4.042.013.000,00	1.073.845.129,00	25,33	0,00
2.5.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.4	1.115.203.192,00	922.007.890,00	87,16	0,00
	JUMLAH TRANSFER		5.157.216.192,00	1.995.853.019,00	38,70	3.716.867.124,00
	BELANJA DAN TRANSFER		2.876.375.978.791,52	2.528.500.802.938,19	87,91	2.406.586.936.843,04
	SURPLUS / (DEFISIT)		(236.405.418.103,52)	31.356.404.855,67	(13,26)	(77.883.504.174,19)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5	262.061.614.963,52	401.802.129.830,52	153,32	388.671.502.466,71
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.5.1	256.564.582.703,52	256.564.582.703,52	100,00	330.288.545.977,71
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.5.1	0,00	139.752.780.949,00		55.640.573.400,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.5.1	5.497.032.260,00	5.484.766.178,00	99,78	2.742.383.089,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2	25.656.196.860,00	155.495.608.833,00	606,07	54.223.415.589,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.5.2	20.159.164.600,00	16.000.000.000,00	79,37	8.700.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.1.5.2	5.497.032.260,00	139.495.608.833,00	2.537,65	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.5.2	0,00	0,00		45.523.415.589,00
	PEMBIAYAAN NETTO		236.405.418.103,52	246.306.520.997,52	104,19	334.448.086.877,71
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	277.662.925.853,19	0,00	256.564.582.703,52



TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	741.531.123.201,00	872.017.242.152,12	117,60	1.015.884.216.919,86
411	Pendapatan Pajak Daerah	440.000.000.000,00	509.039.468.746,00	115,69	689.543.006.040,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	36.691.027.400,00	35.010.375.259,00	95,42	51.362.153.192,00
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.520.905.570,00	31.927.293.792,00	95,25	28.241.844.911,00
414	Lain-lain PAD yang Sah	231.319.190.231,00	296.040.104.355,12	127,98	246.737.212.776,86
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.453.476.644.604,00	1.415.498.666.396,00	97,39	1.399.707.370.974,00
421	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.086.295.148.560,00	1.083.171.964.899,00	99,71	1.106.494.405.814,00
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	74.511.394.093,00	86.344.563.026,00	115,88	53.495.246.384,00
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	40.430.777.107,00	38.670.158.675,00	95,65	24.159.177.895,00
42103	Dana Alokasi Umum	769.048.963.000,00	762.556.115.000,00	99,16	838.948.449.000,00
42104	Dana Alokasi Khusus	202.304.014.360,00	195.601.128.198,00	96,69	189.891.532.535,00
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	28.928.586.000,00	28.928.586.000,00	100,00	41.073.011.000,00
42203	Dana Penyesuaian	28.928.586.000,00	28.928.586.000,00	100,00	41.073.011.000,00
423	Transfer Pemerintah Provinsi	255.593.262.838,00	222.967.276.647,00	87,24	252.139.954.160,00
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	255.593.262.838,00	222.967.276.647,00	87,24	252.139.954.160,00
424	Bantuan Keuangan	82.659.647.206,00	80.430.838.850,00	97,30	0,00
42401	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	82.659.647.206,00	80.430.838.850,00	97,30	0,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	167.951.500.000,00	141.063.595.101,00	83,99	88.328.640.000,00
431	Pendapatan Hibah	167.951.500.000,00	141.063.595.101,00	83,99	88.328.640.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.362.959.267.805,00	2.428.579.503.649,12	102,78	2.503.920.227.893,86
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	2.175.216.112.217,19	1.951.301.711.023,00	89,71	2.025.462.086.541,19
511	Belanja Pegawai	1.134.564.423.225,19	1.010.111.841.189,00	89,03	1.181.889.361.829,00
512	Belanja Barang	859.382.967.805,00	798.841.580.650,00	92,96	711.101.422.815,19
513	Bunga	8.010.000.000,00	5.427.749.091,00	67,76	6.578.046.142,00
515	Hibah	128.766.006.687,00	93.233.837.587,00	72,41	79.149.334.000,00

No		2		3		4		5		6	
510	Bantuan Sosial		44.492.714.500,00		43.686.702.506,00		98,19		46.743.921.755,00		
52	BELANJA MODAL		307.168.807.801,00		276.157.283.029,00		89,90		501.033.407.778,00		
521	Belanja Tanah		7.400.700.000,00		2.772.077.406,00		37,46		18.044.020.000,00		
522	Belanja Peralatan dan Mesin		143.259.350.921,00		128.790.481.108,00		90,60		99.754.707.372,00		
523	Belanja Gedung dan Bangunan		35.666.473.387,00		30.694.955.339,00		86,06		144.703.165.317,00		
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		117.689.262.659,00		109.784.631.171,00		93,28		235.965.307.071,00		
525	Belanja Aset Tetap Lainnya		1.797.647.834,00		1.789.184.630,00		99,53		1.910.823.018,00		
526	Belanja Aset Lainnya		1.355.373.000,00		1.325.953.375,00		97,83		655.385.000,00		
53	BELANJA TAK TERDUGA		158.643.578.040,00		126.277.177.930,00		79,60		9.455.600,00		
531	Belanja Tak Terduga		158.643.578.040,00		126.277.177.930,00		79,60		9.455.600,00		
	JUMLAH BELANJA		2.641.028.498.058,19		2.353.736.171.982,00		89,12		2.526.504.949.919,19		
6	TRANSFER										
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA		0,00		0,00		0,00		0,00		
611	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00		0,00		0,00		0,00		
62	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		1.134.531.000,00		1.134.531.000,00		100,00		1.995.853.019,00		
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		1.134.531.000,00		1.134.531.000,00		100,00		1.023.845.129,00		
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00		0,00		0,00		972.007.890,00		
	JUMLAH TRANSFER		1.134.531.000,00		1.134.531.000,00		100,00		1.995.853.019,00		
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.642.163.029.058,19		2.354.870.702.982,00		89,13		2.528.500.802.938,19		
	SURPLUS / (DEFISIT)		(279.203.761.253,19)		73.708.800.667,12		(26,40)		(24.580.575.044,33)		
7	PEMBIAYAAN										
71	PENERIMAAN DAERAH		388.159.958.113,19		334.337.716.975,19		86,13		401.802.129.830,52		
711	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		277.662.925.853,19		277.640.687.080,19		99,99		256.564.582.703,52		
714	Pinjaman Dalam Negeri		75.000.000.000,00		32.159.096.032,00		42,88		139.752.780.949,00		
715	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		5.497.032.260,00		5.484.766.176,00		99,78		5.484.766.178,00		
716	Penerimaan Kembali Pinjam Daerah		30.000.000.000,00		19.053.167.687,00		63,51		0,00		
72	PENGELUARAN DAERAH		108.956.196.860,00		80.545.341.402,00		73,32		155.495.608.833,00		
722	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		28.459.164.600,00		24.300.000.000,00		85,39		16.000.000.000,00		
723	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		80.497.032.260,00		56.245.341.402,00		69,87		139.495.608.833,00		
	PEMBIAYAAN NETTO		279.203.761.253,19		253.792.375.573,19		90,90		246.306.520.997,52		

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	327.501.176.240,31	0,00	221.725.945.953,19

BOGOR, 31 Desember 2020
WALI KOTA BOGOR

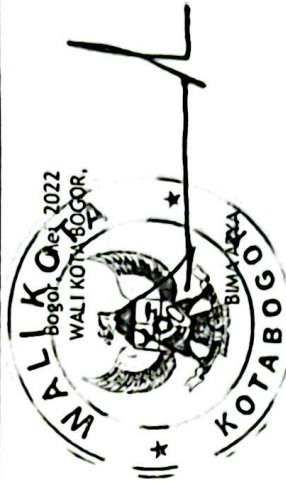
BIMA ARYA



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2020 (AUDITED)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	914.550.650.320,00	1.075.240.926.213,11	117,57	872.017.242.152,12
3	Pendapatan Pajak Daerah	565.600.000.000,00	624.784.886.145,00	110,46	509.039.468.746,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	31.609.433.495,00	36.033.010.539,00	113,99	35.010.375.259,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.420.552.150,00	32.420.552.150,00	100,00	31.927.293.792,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	284.920.664.675,00	382.002.477.379,11	134,07	296.040.104.355,12
7	PENDAPATAN TRANSFER	1.461.272.579.401,00	1.463.000.794.326,00	100,12	1.415.498.666.396,00
8	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.060.368.329.482,00	1.070.122.263.566,00	100,92	1.083.171.964.899,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	80.362.123.814,00	100.309.953.893,00	124,82	86.344.563.026,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	38.884.164.485,00	47.781.743.302,00	122,88	38.670.158.675,00
11	Dana Alokasi Umum	751.862.545.000,00	751.862.545.000,00	100,00	762.556.115.000,00
12	Dana Alokasi Khusus	189.259.496.183,00	170.168.021.371,00	89,91	195.601.128.198,00
13	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	57.017.287.000,00	57.017.287.000,00	100,00	28.928.586.000,00
14	Dana Penyesuaian	57.017.287.000,00	57.017.287.000,00	100,00	28.928.586.000,00
15	Transfer Pemerintah Provinsi	245.027.063.719,00	238.649.379.020,00	97,40	222.967.276.647,00
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	245.027.063.719,00	238.649.379.020,00	97,40	222.967.276.647,00
17	Bantuan Keuangan	98.859.899.200,00	97.211.864.740,00	98,33	80.430.838.850,00
18	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	98.859.899.200,00	97.211.864.740,00	98,33	80.430.838.850,00
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	106.325.528.000,00	106.539.215.238,00	100,20	141.063.595.101,00
20	Pendapatan Hibah	106.325.528.000,00	106.324.704.000,00	100,00	141.063.595.101,00
21	Pendapatan Lainnya	0,00	214.511.238,00	0,00	0,00
22	JUMLAH PENDAPATAN	2.482.148.757.721,00	2.644.780.935.777,11	106,55	2.428.579.503.649,12
23	BELANJA				
24	BELANJA OPERASI	2.331.894.995.723,00	2.195.790.762.074,00	94,16	1.951.301.711.023,00
25	Belanja Pegawai	1.114.317.702.705,00	1.091.969.595.660,00	97,99	1.010.111.841.189,00
26	Belanja Barang	1.081.139.499.721,00	981.671.384.413,00	90,80	798.841.580.650,00
27	Bunga	7.000.000.000,00	4.047.853.424,00	57,83	5.427.749.091,00
28	Hibah	72.728.643.297,00	68.284.278.577,00	93,89	93.233.837.587,00
29	Bantuan Sosial	56.709.150.000,00	49.817.650.000,00	87,85	43.686.702.506,00
30	BELANJA MODAL	477.902.795.330,00	418.874.649.797,00	87,65	276.157.283.029,00
31	Belanja Tanah	1.100.000.000,00	456.222.600,00	41,47	2.772.077.406,00
32	Belanja Peralatan dan Mesin	148.130.521.025,00	134.821.926.424,00	91,02	129.790.481.108,00
33	Belanja Gedung dan Bangunan	90.558.513.200,00	75.413.812.539,00	83,28	30.694.955.339,00
34	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.110.208.051,00	206.667.544.227,00	87,90	109.784.631.171,00

35	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.473.739.964,00	1.037.371.248,00	41,94	1.789.184.630,00
36	Belanja Aset Lainnya	529.813.090,00	477.772.759,00	90,18	1.325.953.375,00
37	BELANJA TAK TERDUGA	30.111.279.308,00	21.400.409.034,00	71,07	126.277.177.930,00
38	Belanja Tak Terduga	30.111.279.308,00	21.400.409.034,00	71,07	126.277.177.930,00
39	JUMLAH BELANJA	2.839.909.070.361,00	2.636.065.820.905,00	92,82	2.353.736.171.982,00
40	TRANSFER				
41	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.700.000.000,00	1.660.750.000,00	97,69	1.134.531.000,00
44	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.700.000.000,00	1.660.750.000,00	97,69	1.134.531.000,00
45	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
46	JUMLAH TRANSFER	1.700.000.000,00	1.660.750.000,00	97,69	1.134.531.000,00
47	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.841.609.070.361,00	2.637.726.570.905,00	92,83	2.354.870.702.982,00
48	SURPLUS / (DEFISIT)	(359.460.312.640,00)	7.054.364.872,11	(1,96)	73.708.800.667,12
49	PEMBIAYAAN			0,00	
50	PENERIMAAN DAERAH	364.957.344.900,00	493.565.383.802,31	135,24	334.337.716.975,19
51	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	327.501.176.240,00	327.542.156.075,31	100,01	277.640.687.080,19
52	Pinjaman Dalam Negeri	31.959.136.400,00	160.538.461.551,00	502,32	32.159.096.032,00
53	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	5.484.766.176,00
54	Penerimaan Kembali Pinutang Daerah	0,00	0,00	0,00	19.053.167.687,00
55	PENGELUARAN DAERAH	5.497.032.260,00	135.617.812.976,00	2.467,11	80.545.341.402,00
56	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	24.300.000.000,00
57	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.497.032.260,00	135.617.812.976,00	2.467,11	56.245.341.402,00
58	PEMBIAYAAN NETTO	359.460.312.640,00	357.947.570.826,31	99,58	253.792.375.573,19
59	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	365.001.935.698,42	0,00	327.501.176.240,31



No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.150.887.225.486,00	1.147.623.045.708,92	99,72	1.075.240.926.213,11
411	Pendapatan Pajak Daerah	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	624.986.554.745,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	37.834.007.000,00	23.942.828.414,00	63,28	35.831.341.939,00
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.169.497.964,00	32.170.048.280,00	100,00	32.420.552.150,00
414	Lain-lain PAD yang Sah	326.707.820.522,00	346.549.576.477,92	106,07	382.002.477.379,11
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.673.248.217.735,00	1.639.426.533.844,00	97,98	1.463.000.794.326,00
421	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.245.563.899.115,00	1.217.686.039.277,00	97,76	1.070.122.263.566,00
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	72.815.236.000,00	80.109.979.732,00	110,02	100.309.953.893,00
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.469.404.000,00	36.309.610.039,00	142,56	47.781.743.302,00
42103	Dana Alokasi Umum	751.862.545.000,00	745.659.353.200,00	99,17	751.862.545.000,00
42104	Dana Alokasi Khusus	395.416.714.115,00	355.607.096.306,00	89,93	170.168.021.371,00
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	32.306.424.000,00	32.306.424.000,00	100,00	57.017.287.000,00
42201	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
42203	Dana Penyesuaian	32.306.424.000,00	32.306.424.000,00	100,00	57.017.287.000,00
423	Transfer Pemerintah Provinsi	299.438.274.620,00	295.657.846.999,00	98,74	238.649.379.020,00
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	299.438.274.620,00	295.657.846.999,00	98,74	238.649.379.020,00
42302	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Bantuan Keuangan	95.939.620.000,00	93.776.223.568,00	97,75	97.211.864.740,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.901.250,00	55.479.250,00	1.131,94	106.539.215.238,00
431	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	106.324.704.000,00
432	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Pendapatan Lainnya	4.901.250,00	55.479.250,00	1.131,94	214.511.238,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.824.140.344.471,00	2.787.105.058.802,92	98,69	2.644.780.935.777,11
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	2.543.324.625.726,00	2.406.860.416.778,00	94,63	2.195.790.762.074,00
511	Belanja Pegawai	1.184.422.203.116,00	1.128.093.224.058,00	95,24	1.091.969.595.660,00
512	Belanja Barang	1.133.228.246.092,00	1.068.553.405.102,00	94,12	981.671.384.413,00

SIMPUL-BOGOR

SAP/PP-11

Hal

1

1	2	3	4	5	6
513	Bunga	5.750.000.000,00	4.282.368.790,00	74,48	4.047.853.424,00
514	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Hibah	155.295.598.018,00	146.302.919.328,00	94,21	68.284.278.577,00
516	Bantuan Sosial	64.628.578.500,00	61.628.501.500,00	95,36	49.817.650.000,00
52	BELANJA MODAL	624.518.638.833,00	571.966.552.801,00	91,59	418.874.649.797,00
521	Belanja Tanah	25.801.162.564,00	17.328.944.627,00	67,16	456.222.600,00
522	Belanja Peralatan dan Mesin	102.700.955.284,00	93.283.801.959,00	90,83	134.821.926.424,00
523	Belanja Gedung dan Bangunan	205.045.266.681,00	188.457.698.905,00	91,91	75.413.812.539,00
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.018.937.204,00	271.189.473.185,00	93,83	208.667.544.227,00
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	741.110.100,00	708.136.673,00	95,55	1.037.371.248,00
526	Belanja Aset Lainnya	1.211.207.000,00	998.497.452,00	82,44	477.772.759,00
53	BELANJA TAK TERDUGA	14.704.015.610,00	5.366.713.424,00	36,50	21.400.409.034,00
531	Belanja Tak Terduga	14.704.015.610,00	5.366.713.424,00	36,50	21.400.409.034,00
	JUMLAH BELANJA	3.182.547.280.169,00	2.984.193.683.003,00	93,77	2.636.065.820.905,00
6	TRANSFER				
62	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.200.000.000,00	2.160.750.000,00	98,22	1.660.750.000,00
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	2.200.000.000,00	2.160.750.000,00	98,22	1.660.750.000,00
	JUMLAH TRANSFER	2.200.000.000,00	2.160.750.000,00	98,22	1.660.750.000,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.184.747.280.169,00	2.986.354.433.003,00	93,77	2.637.726.570.905,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(360.606.935.698,00)	(199.249.374.200,08)	55,25	7.054.364.872,11
7	PEMBIAYAAN				
71	PENERIMAAN DAERAH	370.498.967.958,00	370.486.701.874,42	100,00	493.565.383.802,31
711	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	365.001.935.698,00	365.001.935.698,42	100,00	327.542.156.075,31
714	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	160.538.461.551,00
715	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	5.484.766.176,00
72	PENGELUARAN DAERAH	9.892.032.260,00	9.878.849.606,00	99,87	135.617.812.976,00
722	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.395.000.000,00	4.394.083.430,00	99,98	0,00
723	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	135.617.812.976,00
	PEMBIAYAAN NETTO	360.606.935.698,00	360.607.852.268,42	100,00	357.947.570.826,31

1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	161.358.478.068,34	0,00	365.001.935.898,42

Bogor, 31 Desember 2022
WALI KOTA BOGOR

BIMA ARYA

TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE : 01 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023

No	Uralan	Anggaran 2023	Reallsasi 2023	%	Reallsasi 2022
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.403.260.832.834,00	1.338.618.268.168,80	95,39	1.147.623.045.708,92
411	Pendapatan Pajak Daerah	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26	744.960.592.537,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	54.039.453.685,00	31.081.390.548,00	57,52	23.942.828.414,00
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.539.076.644,00	33.960.776.435,00	101,26	32.170.048.280,00
414	Lain-lain PAD yang Sah	342.580.071.400,00	375.822.720.275,80	109,70	346.549.576.477,92
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.656.443.388.900,00	1.628.857.302.371,00	98,33	1.639.426.533.844,00
421	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.251.302.321.777,00	1.243.743.075.523,00	99,40	1.217.686.039.277,00
42101	Dana Bagi Hasil	99.241.751.059,00	102.205.851.687,00	102,99	116.419.589.771,00
42102	Dana Alokasi Umum	793.077.597.000,00	792.504.632.043,00	99,93	745.659.353.200,00
42103	Dana Alokasi Khusus - Fisik	57.374.069.318,00	55.796.999.805,00	97,25	79.141.831.118,00
42104	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	301.608.904.400,00	293.235.591.988,00	97,22	276.465.265.188,00
422	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.912.254.000,00	5.912.254.000,00	100,00	32.306.424.000,00
42201	Dana Insentif Daerah	5.912.254.000,00	5.912.254.000,00	100,00	32.306.424.000,00
423	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	399.228.813.123,00	379.201.972.848,00	94,98	389.434.070.567,00
42301	Pendapatan Bagi Hasil	321.120.581.322,00	301.185.316.222,00	93,79	295.657.846.999,00
42302	Bantuan Keuangan	78.108.231.801,00	78.016.656.626,00	99,88	93.776.223.568,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	55.479.250,00
431	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	55.479.250,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.059.704.221.734,00	2.967.475.570.539,80	96,99	2.787.105.058.802,92
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	2.586.773.906.739,00	2.508.123.306.971,00	96,96	3.505.326.971.250,28
511	Belanja Pegawai	1.100.584.232.600,00	1.063.654.426.888,00	96,64	2.226.559.778.317,00
512	Belanja Barang	1.275.075.816.889,00	1.236.457.277.949,00	96,97	1.066.553.405.103,07
513	Bunga	6.444.188.950,00	6.191.682.700,00	96,08	4.282.366.794,28
514	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Hibah	149.367.753.300,00	147.381.004.434,00	98,67	146.302.919.474,30

SIMP@L-BOGOR

SAP/PP-11

Hal

1

1	2	3	4	5	6
516	Bantuan Sosial	55.301.915.000,00	54.438.915.000,00	98,44	61.828.501.561,63
52	BELANJA MODAL	569.117.298.057,00	518.164.968.738,00	91,05	936.264.758.160,93
521	Belanja Tanah	1.755.214.951,00	1.287.152.960,00	73,33	17.328.944.644,33
522	Belanja Peralatan dan Mesin	104.484.410.020,00	97.928.993.032,00	93,73	184.729.572.347,00
523	Belanja Gedung dan Bangunan	202.407.182.070,00	178.951.840.395,00	88,41	188.457.699.093,46
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan	259.432.327.397,00	238.985.747.391,00	92,12	544.041.907.243,00
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	934.394.219,00	911.157.960,00	97,51	708.137.381,14
526	Belanja Aset Lainnya	103.769.400,00	100.077.000,00	96,44	998.497.452,00
53	BELANJA TAK TERDUGA	16.931.553.150,00	1.066.654.400,00	6,30	5.366.713.424,00
531	Belanja Tak Terduga	16.931.553.150,00	1.066.654.400,00	6,30	5.366.713.424,00
	JUMLAH BELANJA	3.172.822.757.946,00	3.027.354.930.109,00	95,42	4.446.958.442.835,21
6	BELANJA TRANSFER				
62	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	1.870.000.000,00	1.660.750.000,00	88,81	2.160.750.000,00
621	Belanja Bantuan Keuangan anjar Daerah Kabupaten/Kota	1.870.000.000,00	1.660.750.000,00	88,81	2.160.750.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.870.000.000,00	1.660.750.000,00	88,81	2.160.750.000,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.174.692.757.946,00	3.029.015.680.109,00	95,41	4.449.119.192.835,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(114.988.536.212,00)	(61.540.109.569,20)	53,52	(1.662.014.134.032,29)
7	PEMBIAYAAN				
71	PENERIMAAN DAERAH	192.621.338.728,00	192.611.572.644,34	99,99	312.453.495.068,00
711	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	161.358.478.068,00	161.360.978.068,34	100,00	306.968.728.892,00
712	Pencairan Dana Cadangan	25.765.828.400,00	25.765.828.400,00	100,00	0,00
715	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.484.766.176,00	99,78	5.484.766.176,00
72	PENGELUARAN DAERAH	77.632.802.516,00	76.821.017.476,00	98,95	9.878.849.606,00
721	Pembentukan Dana Cadangan	71.336.251.300,00	71.336.251.300,00	100,00	0,00
722	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	4.394.083.430,00
723	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	6.296.551.216,00	5.484.766.176,00	87,11	5.484.766.176,00
	PEMBIAYAAN NETTO	114.988.536.212,00	115.790.555.168,34	100,70	302.574.645.462,00

1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	54.250.445.599,14	0,00
				(1.359.439.488.570,29)

Bogor, 31 Desember 2023
WALI KOTA BOGOR

BIMA ARYA